

LAMPIRAN 1
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 94 TAHUN 2012
 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM
 YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

DAFTAR GAJI POKOK HAKIM
 DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA, DAN
 PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Masa Kerja	Golongan III				Golongan IV				
	a	b	c	d	a	b	c	d	e
0	2.064.100	2.131.100	2.212.100	2.337.300	2.136.100	2.539.200	2.616.600	2.738.500	2.870.200
1									
2	2.155.700	2.215.700	2.309.100	2.407.100	2.598.900	2.615.000	2.723.600	2.840.900	2.961.100
3									
4	2.189.200	2.281.800	2.378.300	2.478.900	2.588.500	2.698.100	2.807.000	2.923.700	3.049.500
5									
6	2.334.600	2.519.900	2.719.300	2.932.900	3.660.900	3.773.500	3.890.800	4.013.100	4.140.500
7									
8	2.347.100	2.430.100	2.522.500	2.629.200	3.740.400	3.838.200	3.977.100	4.108.100	4.234.200
9									
10	2.450.100	2.538.600	2.599.200	2.707.700	3.822.200	3.941.600	4.066.900	4.190.700	4.330.500
11									
12	2.557.600	2.634.300	2.713.400	2.794.800	4.000.200	4.028.400	4.107.600	4.291.100	4.430.200
13									
14-15	2.663.800	2.749.900	2.832.400	2.917.400	4.004.900	4.113.900	4.221.800	4.389.400	4.532.200
16-17	2.787.000	2.870.600	2.956.700	3.045.400	4.130.800	4.230.900	4.328.900	4.490.600	4.639.700
18	2.909.200	3.006.600	3.086.500	3.179.100	4.271.500	4.373.700	4.473.900	4.664.800	4.746.600

Masa Kerja	Golongan III				Golongan IV				
	a	b	c	d	a	b	c	d	e
19									
20	3.037.000	3.128.100	3.221.000	3.319.000	3.118.200	3.229.700	3.329.200	3.735.200	3.858.700
21									
22	3.170.000	3.293.100	3.393.000	3.464.200	3.398.200	3.575.200	3.785.200	3.839.000	4.017.000
23									
24	3.338.400	3.468.700	3.510.900	3.619.200	3.734.800	3.839.200	3.957.000	4.076.000	4.199.000
25									
26	3.454.600	3.559.300	3.655.000	3.775.000	3.884.200	4.004.000	4.125.000	4.248.800	4.376.000
27									
28	3.606.000	3.744.100	3.835.000	3.940.600	4.054.800	4.180.000	4.306.000	4.435.000	4.569.300
29									
30	3.764.500	3.877.100	3.990.500	4.113.600	4.237.000	4.364.100	4.495.000	4.629.000	4.769.700
31									
32	3.929.700	4.047.000	4.166.000	4.294.100	4.422.900	4.556.000	4.692.200	4.813.000	4.978.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 94 TAHUN 2012
 TENTANG
 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA
 DI BAWAH MAJLISMAH AGUNG

TUNJANGAN HAKIM
 DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA,
 PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN MILITER

NO	JABATAN	Pengadilan Tinggi, Dihimpitama, Dihimpiti
A	HAKIM TINGKAT BANDING	
1	Ketua/Kepala	40.200.000
2	Wakil Ketua/Wakil Kepala	36.500.000
3	Hakim Utama/Magjen/ Laksada/Marsda TNI	33.300.000
4	Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI	31.100.000
5	Hakim Madya Utama/Kolonel	29.100.000
6	Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel	27.200.000

B	HAKIM TINGKAT PERTAMA	Pengadilan	Pengadilan Kelas		
		Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)	IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI), Ditmil tipe A	Pengadilan Kelas IB, Ditmil tipe B	Pengadilan Kelas II
1	Ketua/Kepada	27.000.000	23.400.000	20.200.000	17.500.000
2	Wakil Ketua/Wakil Kepala	24.500.000	21.300.000	18.400.000	15.900.000
3	Hakim Utama	24.000.000	20.300.000	17.200.000	14.600.000
4	Hakim Utama Muda	22.400.000	19.000.000	16.100.000	13.600.000
5	Hakim Madya Utama/Kolonel	21.000.000	17.800.000	15.100.000	12.800.000
6	Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel	19.600.000	16.600.000	14.100.000	11.900.000
7	Hakim Madya Pratama/Mayor	18.300.000	15.500.000	13.100.000	11.100.000
8	Hakim Pratama Utama	17.100.000	14.500.000	12.300.000	10.400.000
9	Hakim Pratama Madya/ Kapten	16.000.000	13.500.000	11.500.000	9.700.000
10	Hakim Pratama Muda	14.900.000	12.700.000	10.700.000	9.100.000
11	Hakim Pratama	14.000.000	11.800.000	10.030.000	8.500.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 94/TAHUN 2012
 TENTANG
 HAK KIELANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA
 DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

TUNJANGAN KEMAHALAN

Zona	Wilayah	Tunjangan Kemahalan
Zona 1	DKI Jakarta dan lokasi kerja lainnya yang tidak termasuk pada zona 2, zona 3, dan zona 3 khusus	
Zona 2	Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	1.350.000
Zona 3	Papua, Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan	2.400.000
Zona 3 khusus	Bumi Naluhara (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Utara)	10.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO